ADMINISTRASI PUBLIK KONTEMPORER:

KEBIJAKAN, PELAYANAN, PEMBERDAYAAN, AKUNTANSI, DAN ANALISIS DATA SEKTOR PUBLIK



Khusnul Hatimah, S. Pd., M.A.P.
Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P.
Dr. Saenab, S. Sos., M. Si.
Asrida, S.Pd., M.Pd.
Mahrani, S.Stat., M.Stat.

Editor: Tri Cahyo Nugroho, S.A.P., M.A.P.

ADMINISTRASI PUBLIK KONTEMPORER: KEBIJAKAN, PELAYANAN, PEMBERDAYAAN, AKUNTANSI, DAN ANALISIS DATA SEKTOR PUBLIK

Khusnul Hatimah, S. Pd., M.A.P.
Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P.
Dr. Saenab, S. Sos., M. Si.
Asrida, S.Pd., M.Pd.
Mahrani, S.Stat., M.Stat.

Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ADMINISTRASI PUBLIK KONTEMPORER: KEBIJAKAN, PELAYANAN, PEMBERDAYAAN, AKUNTANSI, DAN ANALISIS DATA SEKTOR PUBLIK

Penulis:
Khusnul Hatimah, S. Pd., M.A.P.
Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P.
Dr. Saenab, S. Sos., M. Si.
Asrida, S.Pd., M.Pd.
Mahrani, S.Stat., M.Stat.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tri Cahyo Nugroho, S.A.P., M.A.P.

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
xii, 208, uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-353-4

Cetakan Pertama:
Oktober 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab penerbit

Copyright © 2026 by Tahta Media Group
All Rights Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel, Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557
email: tahtaliterasimedia@gmail.com
website: http://store.tahtamedia.co.id/
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Administrasi Publik Kontemporer: Kebijakan, Pelayanan, Pemberdayaan, Akuntansi, dan Analisis Data Sektor Publik" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Administrasi publik merupakan bidang ilmu dan praktik yang senantiasa berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat, perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, serta tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif, transparan, akuntabel, dan responsif. Perubahan lingkungan strategis tersebut menuntut administrasi publik tidak lagi dipahami semata-mata sebagai aktivitas administratif pemerintahan, tetapi sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, sumber daya, dan pendekatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai dimensi administrasi publik dalam konteks kontemporer. Pembahasan di dalamnya mencakup kebijakan publik, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, akuntansi sektor publik, serta analisis data sektor publik. Kelima bidang tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif serta berorientasi pada hasil.

Kebijakan publik menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam merespons berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pelayanan publik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat bukan

hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kapasitas dan peran penting dalam proses pembangunan. Selanjutnya, akuntansi sektor publik berperan dalam mendukung pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan serta akuntabel. Perkembangan teknologi informasi juga semakin memperkuat kebutuhan akan pemanfaatan data sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, evaluasi program, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, buku ini tidak hanya membahas konsep-konsep teoritis, tetapi diupayakan pula untuk menghubungkannya dengan praktik dan perkembangan administrasi publik yang terjadi dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu pembaca memahami bahwa administrasi publik merupakan bidang yang bersifat multidimensional dan membutuhkan kemampuan untuk mengintegrasikan aspek kelembagaan, kebijakan, pelayanan, sumber daya manusia, keuangan, pemberdayaan, serta data dan teknologi.

Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi pemerintahan, aparatur sipil negara, pengelola organisasi publik, maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Bagi mahasiswa, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam memahami berbagai konsep dan praktik administrasi publik. Bagi praktisi dan penyelenggara pemerintahan, buku ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan pengayaan dalam menghadapi berbagai tantangan tata kelola sektor publik.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Dinamika administrasi publik yang terus berkembang menyebabkan konsep, kebijakan, regulasi, teknologi, dan praktik sektor publik senantiasa mengalami perubahan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan

masukan konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, motivasi, dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku *Administrasi Publik Kontemporer: Kebijakan, Pelayanan, Pemberdayaan, Akuntansi, dan Analisis Data Sektor Publik* dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, inovatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Makassar,
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB I KONSEP DASAR DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK **1**
Khusnul Hatimah, S. Pd., M.A.P. **1**
Universitas Negeri Makassar **1**
A. Pengertian Kebijakan Publik 1
B. Ruang Lingkup Kebijakan Publik 2
C. Unsur-unsur Kebijakan Publik 5
D. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Publik 7
E. Perkembangan Kebijakan Publik di Era Digital 11
Daftar Pustaka 14
Profil Penulis 15
BAB 2 PROSES, ANALISIS DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK **16**
Khusnul Hatimah, S. Pd., M.A.P. **16**
Universitas Negeri Makassar **16**
A. Siklus Kebijakan Publik 16
B. Analisis Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*) 19
C. Implementasi Kebijakan 22
D. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan 24
Daftar Pustaka 26
Profil Penulis 28
BAB 3 KONSEP DAN PRINSIP MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK **29**
Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P **29**
Universitas Negeri Makassar **29**
A. Pendahuluan 29

B. Konsep Dasar Pelayanan Publik 30
C. Prinsip dan Standar Pelayanan Publik 33
D. Kualitas Pelayanan 36
E. Etika Pelayanan Publik 39
F. Penutup 42
Daftar Pustaka 44
Profil Penulis 45
BAB 4 INOVASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK 46
Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P 46
Universitas Negeri Makassar 46
A. Pendahuluan 46
B. Inovasi Pelayanan Publik 47
C. Digital Governance 50
D. *E-Government* dan Pelayanan Digital 52
E. Pengukuran Kepuasan Masyarakat 55
F. Penutup 58
Daftar Pustaka 60
Profil Penulis 62
BAB 5 KONSEP DASAR DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 63
Dr. Saenab, S.Sos., M.Si. 63
Universitas Negeri Makassar 63
A. Pendahuluan 63
B. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 65
C. Prinsip dan Pendekatan Pemberdayaan 69
D. Partisipasi Masyarakat 74
E. Peran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan 78
F. Penutup 82
Daftar Pustaka 83

Profil Penulis 87
BAB 6 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 89
Dr. Saenab, S.Sos., M.Si. 89
Universitas Negeri Makassar 89
A. Pendahuluan 89
B. Perencanaan Program Pemberdayaan 91
C. Pendampingan Masyarakat 95
D. Penguatan Kelembagaan Lokal 98
E. Evaluasi Keberhasilan Program Pemberdayaan 101
F. Penutup 106
Daftar Pustaka 107
Profil Penulis 110
BAB 7 KONSEP DASAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 111
Asrida, S.Pd., M.Pd. 111
Universitas Negeri Makassar 111
A. Pendahuluan 111
B. Pengertian Akuntansi Sektor Publik 112
C. Karakteristik Organisasi Sektor Publik 114
D. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 118
E. Siklus Akuntansi Sektor Publik 122
F. Teknik dan Basis Akuntansi Sektor Publik 126
G. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Akuntansi Sektor Publik 128
H. Sistem Informasi dan Digitalisasi Akuntansi Sektor Publik di Indonesia 129
I. Rangkuman 131
Daftar Pustaka 133
Profil Penulis 136

BAB 8 AKUNTABILITAS DAN PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK 137
Asrida, S.Pd., M.Pd. 137
Universitas Negeri Makassar 137
A. Pendahuluan 137
B. Pengelolaan Keuangan Negara 139
C. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 142
D. Akuntabilitas dan Transparansi Publik 145
E. Audit Sektor Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 148
F. Transformasi Digital dan Akuntabilitas Sektor Publik 153
G. Integrasi Ekonomi Hijau *(Green Budgeting)* dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik 156
H. Rangkuman 158
Daftar Pustaka 160
Profil Penulis 165
BAB 9 DATA, STATISTIK, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 166
Mahrani, S.Stat., M.Stat. 166
Universitas Negeri Makassar 166
A. Data dalam Administrasi Publik 167
B. Statistik sebagai Alat dalam Administrasi Publik 169
C. Data dan Informasi untuk Pengambilan Keputusan Publik 171
D. Jenis dan Sumber Data dalam Sektor Publik 172
E. Variabel dan Pengukuran dalam Administrasi Publik 175
F. Penyajian Data untuk Administrasi Publik 177
G. Statistik Deskriptif untuk Membaca Kondisi Publik 179
H. Membaca dan Menginterpretasikan Data Publik 181
I. Literasi Data bagi Administrasi Publik 182
Daftar Pustaka 183

Profil Penulis 185
BAB 10 ANALISIS DATA UNTUK EVALUASI KEBIJAKAN, PELAYANAN, DAN KINERJA SEKTOR PUBLIK 187
Mahrani, S.Stat., M.Stat. 187
Universitas Negeri Makassar 187
A. Data sebagai Dasar Analisis Administrasi Publik 188
B. Analisis Perbandingan dan Perubahan 190
C. Analisis Hubungan Antarvariabel dalam Sektor Publik 192
D. Regresi sebagai Alat Analisis Kebijakan 194
E. Analisis Data untuk Evaluasi Kebijakan 197
F. Analisis Data Pelayanan Publik 198
G. Analisis Data Pemberdayaan Masyarakat 199
H. Analisis Data Keuangan dan Kinerja Sektor Publik 200
I. Interpretasi Hasil Analisis dan Implikasi Kebijakan 201
J. Studi Kasus Terintegrasi: Analisis Data Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah 201
K. Penutup 203
Daftar Pustaka 205
Profil Penulis 207

BAB I
KONSEP DASAR DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK

Khusnul Hatimah, S. Pd., M.A.P.
Universitas Negeri Makassar

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government chooses to do or not to do*). Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berupa tindakan pemerintah, tetapi juga keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Carl J. Friedrich menjelaskan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Budi Winarno, kebijakan publik berkaitan dengan proses yang dilakukan pemerintah dalam merespons berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Kebijakan publik mencakup tahapan perumusan masalah, penyusunan alternatif kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Buku Winarno secara khusus membahas teori, proses, dan studi kasus kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Dye, T. R. (1981). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Friedrich, C. J. (1969). *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*. New York: McGraw-Hill.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus: Edisi dan Revisi Terbaru*. Jakarta: Buku Seru.

Dunn, W. N. (2012). *Public Policy Analysis: An Introduction* (5th ed.). Boston: Pearson.

Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Anderson, J. E. (2011). *Public Policymaking: An Introduction* (7th ed.). Boston: Wadsworth.

Widodo, J. (2001). *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking: An Introduction* (8th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.

Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Boston: Pearson.

OECD. (2026). *Digital Government Outlook 2026*. Paris: OECD Publishing.

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018

OECD. (2020). *Going Digital Integrated Policy Framework*. OECD Digital Economy Papers, No. 292. Paris: OECD Publishing.

PROFIL PENULIS



Khusnul Hatimah, S. Pd. M.A.P.

Penulis merupakan dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana S1 pada Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar pada tahun 2022. Di Tahun yang sama, penulis melanjutkan studi Magister pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dan lulus pada tahun 2024. Latar belakang pendidikan tersebut akhirnya menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Sebagai seorang akademisi, penulis fokus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan tugas utama seorang dosen. Fokus keilmuan penulis yaitu mengkaji kebijakan pendidikan yang mempelajari regulasi, strategi dan formulasi yang dapat di implementasikan untuk kemajuan pendidikan dalam berbagai aspek. Penulis juga telah menerbitkan jurnal yang berkaitan dengan kebijakan publik yang berfokus pada pendidikan di jurnal nasional maupun internasional. Komitmen ini muncul karena di latar belakangi beberapa faktor seperti kepedulian terhadap pendidikan, regulasi/aturan pendidikan yang masih perlu dibenahi, ketidakmerataan akses pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil dan lain sebagainya.

BAB 2
PROSES, ANALISIS DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Khusnul Hatimah, S. Pd., M.A.P.
Universitas Negeri Makassar

A. SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK

Menurut Howlett, Ramesh dan Perl siklus kebijakan publik lima tahapan yaitu *agenda setting*, *policy formulation*, *decision making*, *policy implementation* dan *policy evaluation* yang dijelaskan berikut ini:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

   Penyusunan agenda merupakan tahap ketika berbagai masalah yang berkembang di masyarakat memperoleh perhatian dari pemerintah dan dipertimbangkan untuk menjadi agenda kebijakan. Tidak semua masalah masyarakat dapat langsung menjadi agenda pemerintah. Suatu masalah perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat, media, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, maupun aktor politik sehingga dianggap penting dan membutuhkan intervensi pemerintah. Kegiatan ini seperti mengidentifikasi masalah publik, mendefinisikan masalah, mengumpulkan informasi dan data mengenai masalah, menentukan tingkat urgensi masalah dan mendorong suatu masalah masuk ke agenda pemerintah.

2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)

   Formulasi kebijakan merupakan tahap penyusunan berbagai alternatif untuk menyelesaikan masalah yang telah masuk dalam

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, J. E. (2010). Public Policymaking: An Introduction (7th ed.). Boston: Cengage Learning.

Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving (6th ed.). CQ Press.

Davies, H. T. O., Nutley, S. M., & Smith, P. C. (Eds.). (2000). What Works? Evidence-Based Policy and Practice in Public Services. Bristol: Policy Press.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). Routledge.

Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). New York: Routledge

Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.

Head, B. W. (2010). Reconsidering evidence-based policy: Key issues and challenges. Policy and Society, 29(2), 77–94. https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2010.03.001

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.

Meter, D. S. Van, & Horn, C. E. Van. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Nutley, S. M., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2007). Using Evidence: How Research Can Inform Public Services. Bristol: Policy Press.

Situmorang, M. S., Damanik, A. S., & Darmansyah, T. (2024). Efektivitas Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan : Pendekatan dan Tantangan. Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Matematika, 3(1), 152–161. https://doi.org/10.61132/arjuna.v3i1.1486

Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan, 3, 25–32. https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912

PROFIL PENULIS



Khusnul Hatimah, S. Pd. M.A.P.

Penulis merupakan dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana S1 pada Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar pada tahun 2022. Di Tahun yang sama, penulis melanjutkan studi Magister pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dan lulus pada tahun 2024. Latar belakang pendidikan tersebut akhirnya menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Sebagai seorang akademisi, penulis fokus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan tugas utama seorang dosen. Fokus keilmuan penulis yaitu mengkaji kebijakan pendidikan yang mempelajari regulasi, strategi dan formulasi yang dapat di implementasikan untuk kemajuan pendidikan dalam berbagai aspek. Penulis juga telah menerbitkan jurnal yang berkaitan dengan kebijakan publik yang berfokus pada pendidikan di jurnal nasional maupun internasional. Komitmen ini muncul karena di latar belakangi beberapa faktor seperti kepedulian terhadap pendidikan, regulasi/aturan pendidikan yang masih perlu dibenahi, ketidakmerataan akses pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil dan lain sebagainya.

BAB 3
KONSEP DAN PRINSIP MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK

Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan wujud utama kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat melalui layanan yang mudah diakses, berkualitas, adil, transparan, dan akuntabel. Karena itu, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat, tetapi juga oleh kemampuannya mewujudkan kebijakan tersebut dalam pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam administrasi publik modern, pelayanan tidak lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas administratif, tetapi sebagai hubungan yang menempatkan masyarakat sebagai warga negara. Melalui perspektif *New Public Service*, Denhardt dan Denhardt (2015) menegaskan bahwa aparatur publik harus melayani warga negara dengan berorientasi pada kepentingan publik, demokrasi, akuntabilitas, nilai kewargaan, dan penghargaan terhadap manusia.

Oleh karena itu, manajemen pelayanan publik berkaitan erat dengan hak masyarakat, kewajiban penyelenggara, standar pelayanan, kualitas pelayanan, dan etika aparatur. Keempat aspek tersebut saling

DAFTAR PUSTAKA

Cronin, J. J., Jr., & Taylor, S. A. (1992). Measuring service quality: A reexamination and extension. *Journal of Marketing, 56*(3), 55–68. https://doi.org/10.1177/002224299205600304

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.

Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen pelayanan publik: Peduli, inklusif, dan kolaboratif*. Gadjah Mada University Press. ISBN 978-979-420-775-8.

Grönroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. *European Journal of Marketing, 18*(4), 36–44. https://doi.org/10.1108/EUM0000000004784

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan*.

Ngorang, P. (2020). *Etika pelayanan publik: Sebuah pengantar*. Rajawali Pers. ISBN 978-623-231-101-5.

OECD. (2020). *OECD public integrity handbook*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en

Ombudsman Republik Indonesia. (2017). *Standar pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009*. Ombudsman Republik Indonesia.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing, 64*(1), 12–40.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

PROFIL PENULIS



Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P.

Penulis merupakan dosen pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma IV (D4) Program Studi Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Ujung Pandang dan pendidikan Magister (S2) Program Studi Administrasi Publik di Universitas Hasanuddin. Latar belakang pendidikan tersebut memberikan perspektif yang komprehensif dalam mengembangkan kajian administrasi publik melalui pendekatan yang memadukan aspek administrasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan. Fokus kajian penulis meliputi administrasi publik, tata kelola pemerintahan (*public governance*), kebijakan publik, pelayanan publik, pemerintahan daerah, manajemen sektor publik, inovasi sektor publik, dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kajian yang dilakukan berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan inovasi sektor publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagai akademisi, penulis aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis juga secara konsisten menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, serta menyusun buku ajar dan buku referensi sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

BAB 4
INOVASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK

Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi mendorong pemerintah melakukan inovasi dan transformasi digital untuk meningkatkan akses, efisiensi, kualitas, dan responsivitas pelayanan publik. Pelayanan tidak lagi terbatas pada tatap muka, tetapi semakin memanfaatkan teknologi dalam proses penyelenggaraannya.

Inovasi sektor publik berbeda dari inovasi bisnis karena berorientasi pada pemecahan masalah, peningkatan nilai pelayanan, dan pemenuhan kepentingan publik, bukan semata-mata keuntungan (Hartley, 2005). Transformasi digital kemudian memperluas inovasi melalui pemanfaatan data, platform, dan sistem terintegrasi. OECD (2020) menegaskan bahwa pemerintahan digital tidak sekadar menggunakan teknologi, tetapi mengubah cara pemerintah merancang layanan agar lebih berbasis data, berorientasi pengguna, terbuka, dan proaktif.

DAFTAR PUSTAKA

DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems, 19*(4), 9–30. https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748

Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199296194.001.0001

Hartley, J. (2005). Innovation in governance and public services: Past and present. *Public Money & Management, 25*(1), 27–34. https://doi.org/10.1111/j.1467-9302.2005.00447.x

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en

Osborne, S. P., & Brown, L. (2011). Innovation in public services: Engaging with risk. *Public Money & Management, 31*(1), 4–6. https://doi.org/10.1080/09540962.2011.545532

Osborne, S. P., & Brown, L. (Eds.). (2013). *Handbook of innovation in public services*. Edward Elgar Publishing.

Osborne, S. P., Brown, L., & Walker, R. M. (Eds.). (2016). *Innovation in public services: Theoretical, managerial, and international perspectives*. Routledge.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL: A multiple-item scale for assessing electronic service quality. *Journal of Service Research, 7*(3), 213–233. https://doi.org/10.1177/1094670504271156

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). *United Nations e-government survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development*. United Nations.

PROFIL PENULIS



Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P.

Penulis merupakan dosen pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma IV (D4) Program Studi Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Ujung Pandang dan pendidikan Magister (S2) Program Studi Administrasi Publik di Universitas Hasanuddin. Latar belakang pendidikan tersebut memberikan perspektif yang komprehensif dalam mengembangkan kajian administrasi publik melalui pendekatan yang memadukan aspek administrasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan. Fokus kajian penulis meliputi administrasi publik, tata kelola pemerintahan (*public governance*), kebijakan publik, pelayanan publik, pemerintahan daerah, manajemen sektor publik, inovasi sektor publik, dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kajian yang dilakukan berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan inovasi sektor publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagai akademisi, penulis aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis juga secara konsisten menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, serta menyusun buku ajar dan buku referensi sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

BAB 5
KONSEP DASAR DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dr. Saenab, S.Sos., M.Si.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Perjalanan pembangunan di Indonesia memperlihatkan pergeseran yang tidak sederhana dalam cara negara memandang warganya. Selama lebih dari tiga dasawarsa, warga ditempatkan sebagai penerima manfaat yang menunggu keputusan dibuat di tingkat yang lebih tinggi, sementara desa diperlakukan sebagai unit administratif paling bawah yang bertugas menjalankan instruksi. Pola ini menghasilkan capaian fisik yang terukur, tetapi menyisakan persoalan yang jauh lebih sulit diperbaiki, yaitu melemahnya kemampuan warga untuk merumuskan sendiri persoalan yang mereka hadapi. Reformasi kelembagaan yang berlangsung sejak akhir 1990-an membuka ruang bagi cara pandang yang berbeda, dan puncaknya tampak pada pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusannya sendiri. Kajian longitudinal atas empat puluh desa memperkirakan bahwa undang-undang tersebut berpotensi meningkatkan daya tanggap pemerintah desa terhadap kebutuhan warga, sepanjang ditopang oleh sistem pengelolaan keuangan yang kuat, penataan kelembagaan

DAFTAR PUSTAKA

Adam, L., Sambodo, M. T., Purwanto, Purnagunawan, R. M., Sarana, J., Ermawati, T., Saptia, Y., Soekarni, M., Adityawati, S., Thoha, M., & Suryanto, J. (2024). *Village fund and Indonesia rural development: Rethinking institutional capacity and governance.* Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8(14), 9875. https://doi.org/10.24294/jipd9875

Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). *Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52(2), 161–183. https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047

Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djunedi, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). *Village Fund, Village-Owned-Enterprises, And Employment: Evidence From Indonesia*. Journal of Rural Studies, 79, 382–394. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052

Aritenang, A. (2021). *The Role Of Social Capital On Rural Enterprises Economic Performance: A Case Study In Indonesia Villages*. SAGE Open, 11(3), 1–12. https://doi.org/10.1177/21582440211044178

Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder Of Citizen Participation*. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2021). *Village Community Empowerment Through Village Owned Enterprise Based On Social Capital In North Sumatera*. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 31(3), 163–175. https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855

Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics Of Alternative Development*. Blackwell.

Ife, J. (2016). *Community Development In An Uncertain World: Vision, Analysis And Practice (2nd Ed.)*. Cambridge University Press.

Indra, J., & Khoirunurrofik, K. (2022). *Understanding The Role Of Village Fund And Administrative Capacity In Stunting Reduction: Empirical Evidence From Indonesia*. PLOS ONE, 17(1), e0262743. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743

Manaf, A., Purbasari, N., Damayanti, M., Aprilia, N., & Astuti, W. (2018). Community-Based Rural Tourism In Inter-Organizational Collaboration: How Does It Work Sustainably? Lessons Learned From Nglanggeran Tourism Village, Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. Sustainability, 10(7), 2142. https://doi.org/10.3390/su10072142

Mansuri, G., & Rao, V. (2013*). Localizing Development: Does Participation Work? World Bank*. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-1

Ostrom, E. (1990). *Governing The Commons: The Evolution Of Institutions For Collective Action*. Cambridge University Press.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). *The Village Fund Program In Indonesia: Measuring The Effectiveness And Alignment To Sustainable Development Goals.* Sustainability, 13(21), 12294. https://doi.org/10.3390/su132112294

Platteau, J.-P., & Gaspart, F. (2003). *The Risk Of Resource Misappropriation In Community-Driven Development*. World Development, 31(10), 1687–1703. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00138-4

Putra, F. (2023). *Village Governance And Public Participation In Indonesia*. Journal of Interdisciplinary Socio-Economic and Community Study, 3(2), 55–64.

Rammohan, A., & Tohari, A. (2023). *Rural Poverty And Labour Force Participation: Evidence From Indonesia's Village Fund Program*. PLOS ONE, 18(6), e0283041. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283041

Rappaport, J. (1987). *Terms Of Empowerment/Exemplars Of Prevention: Toward A Theory For Community Psychology*. American Journal of Community Psychology, 15(2), 121–148. https://doi.org/10.1007/BF00919275

Sen, A. (1999). *Development As Freedom*. Oxford University Press.

Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). *Do Accountability And Transparency Promote Community Trust? Evidence From Village Government In Indonesia*. Journal of Accounting & Organizational Change, 18(3), 397–418. https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070

Suyatna, H., Indroyono, P., Yuda, T. K., & Firdaus, R. S. M. (2024). *How Community-Based Tourism Improves Community Welfare? A Practical Case Study Of 'Governing The Commons' In Rural Nglanggeran, Indonesia*. The International Journal of Community and Social Development, 6(1), 77–96. https://doi.org/10.1177/25166026241228717

Syukri, M. (2023). *Gender Policies Of The New Developmental State: The Case Of Indonesian New Participatory Village Governance*. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 42(1), 1–21. https://doi.org/10.1177/18681034221149750

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Zimmerman, M. A. (2000). *Empowerment Theory: Psychological, Organizational And Community Levels Of Analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.),* Handbook Of Community Psychology (pp. 43–63). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6_2

PROFIL PENULIS



Dr. Saenab S.Sos. M.Si adalah dosen pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar. Ia menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang Doktor (S3) dengan kekhususan kajian pada Kebijakan Pemberdayaan. Minat akademiknya berakar pada keyakinan bahwa kebijakan publik yang sah dan efektif harus tumbuh dari dialog yang setara antara negara dan warga, terutama kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam ruang pengambilan keputusan, seperti perempuan dan masyarakat desa. Fokus penelitiannya tertuju pada dua tema: pertama, kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, mencakup kajian tentang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dari kekerasan, akses perempuan pada layanan publik, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan; kedua, pemberdayaan masyarakat desa, yang menelaah implementasi UU Desa, pengelolaan Dana Desa, kelembagaan BUMDes, dinamika partisipasi warga dalam Musrenbang desa, hingga peran kepala desa sebagai pemimpin transformasional. Hasil-hasil penelitiannya telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional. Komitmen akademiknya tertuju pada penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Ia meyakini bahwa partisipasi yang substantif merupakan prasyarat bagi legitimasi kebijakan adaptif yang mampu menjawab kompleksitas tantangan publik kontemporer. Selain mengajar dan meneliti, ia juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas pemerintahan

desa, pendampingan kelompok perempuan, serta advokasi kebijakan responsif gender di tingkat lokal.

BAB 6
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dr. Saenab, S.Sos., M.Si.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Kesenjangan terbesar dalam praktik pemberdayaan masyarakat di Indonesia tidak terletak pada tataran gagasan, melainkan pada tataran pelaksanaan. Dokumen kebijakan telah merumuskan pemberdayaan secara memadai, prinsipnya telah dikenal luas, dan istilah partisipasi telah menjadi kosakata sehari-hari aparatur desa. Meskipun demikian, hasil di lapangan tetap timpang. Sejumlah desa berhasil mengubah dana yang diterimanya menjadi kelembagaan ekonomi yang hidup, sementara desa lain dengan alokasi serupa berhenti pada rangkaian kegiatan yang berulang setiap tahun tanpa perubahan berarti pada kemandirian warganya. Ketimpangan hasil itu terekam pula pada tataran nasional. Penilaian atas program dana desa menyimpulkan bahwa kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan belum optimal dan sangat bergantung pada mutu pengelolaannya (Saragi et al., 2021), sementara kajian lain menemukan bahwa transfer dana desa belum sepenuhnya menjawab persoalan ketimpangan antarwilayah (Arham & Hatu, 2020). Studi kasus atas penanganan kemiskinan ekstrem bahkan memperlihatkan bahwa hasil yang berbeda dapat

DAFTAR PUSTAKA

Adam, L., Sambodo, M. T., Purwanto, Purnagunawan, R. M., Sarana, J., Ermawati, T., Saptia, Y., Soekarni, M., Adityawati, S., Thoha, M., & Suryanto, J. (2024). *Village Fund And Indonesia Rural Development: Rethinking Institutional Capacity And Governance*. Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8(14), 9875. https://doi.org/10.24294/jipd9875

Arham, M. A., & Hatu, R. (2020). *Does Village Fund Transfer Address The Issue Of Inequality And Poverty? A Lesson From Indonesia*. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(10), 433–442. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.433

Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., Ariutama, G. A., Djunedi, P., Rahman, A. B., & Handoko, R. (2020). *Village Fund, Village-Owned-Enterprises, And Employment: Evidence From Indonesia*. Journal of Rural Studies, 79, 382–394. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052

Aritenang, A. (2021). *The Role Of Social Capital On Rural Enterprises Economic Performance: A Case Study In Indonesia Villages*. SAGE Open, 11(3), 1–12. https://doi.org/10.1177/21582440211044178

Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2021). *Village Community Empowerment Through Village Owned Enterprise Based On Social Capital In North Sumatera*. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 31(3), 163–175. https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855

Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). *Cumulative Impacts Of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence From Indonesia*. American Economic Journal: Economic Policy, 12(4), 88–110. https://doi.org/10.1257/pol.20190245

Indra, J., & Khoirunurrofik, K. (2022). *Understanding The Role Of Village Fund And Administrative Capacity In Stunting Reduction: Empirical Evidence From Indonesia*. PLOS ONE, 17(1), e0262743. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262743

Manurung, E. T., Maratno, S. F. E., Permatasari, P., Rahman, A. B., Qisthi, R., & Manurung, E. M. (2022). *Do Village Allocation Funds Contribute Towards Alleviating Hunger Among The Local Community (SDG#2)? An Insight From Ind*onesia. Economies, 10(7), 155. https://doi.org/10.3390/economies10070155

Ostrom, E. (1990). *Governing The Commons: The Evolution Of Institutions For Collective Action*. Cambridge University Press.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Permatasari, P., Budiarso, A., Dartanto, T., Samosir, A. P., Saputro, B., Ekayana, D., Agustono, E. D., Alim, T. E., Hartono, L., Wahyuputri, F. W., & Wardhana, I. W. (2024). *Village Fund Management And Reporting Systems: Are They Accountable?* Transforming Government: People, Process and Policy, 18(2), 245–262. https://doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098

Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., Rahman, A. B., Samosir, A. P., & Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in Indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. Sustainability, 13(21), 12294. https://doi.org/10.3390/su132112294

Platteau, J.-P., & Gaspart, F. (2003). *The Risk Of Resource Misappropriation In Community-Driven Development*. World Development, 31(10), 1687–1703. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00138-4

Rammohan, A., & Tohari, A. (2023). *Rural Poverty And Labour Force Participation: Evidence From Indonesia's Village Fund Program*. PLOS ONE, 18(6), e0283041. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283041

Saragi, N. B., Muluk, M. R. K., & Sentanu, I. G. E. P. (2021). *Indonesia's Village Fund Program: Does It Contribute To Poverty Reduction?* Jurnal Bina Praja, 13(1), 65–80. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.65-80

Smas, M. H., Mokay, M. M., Nurhayati, E., & Margana. (2025). *Overcoming Extreme Poverty Through The Utilisation Of Village Funds: A Case Study In Indonesia.* Societal Impacts, 6, 100128. https://doi.org/10.1016/j.socimp.2025.100128

Sofyani, H., Pratolo, S., & Saleh, Z. (2022). *Do Accountability And Transparency Promote Community Trust? Evidence From Village Government In Indonesia*. Journal of Accounting & Organizational Change, 18(3), 397–418. https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2020-0070

Suyatna, H., Indroyono, P., Yuda, T. K., & Firdaus, R. S. M. (2024). *How Community-Based Tourism Improves Community Welfare? A Practical Case Study Of 'Governing The Commons' In Rural Nglanggeran, Indonesia*. The International Journal of Community and Social Development, 6(1), 77–96. https://doi.org/10.1177/25166026241228717

Syukri, M. (2023*). Gender Policies Of The New Developmental State: The Case Of Indonesian New Participatory Village Governance*. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 42(1), 1–21. https://doi.org/10.1177/18681034221149750

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PROFIL PENULIS



Dr. Saenab S.Sos. M.Si adalah dosen pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar. Ia menempuh pendidikan tinggi hingga jenjang Doktor (S3) dengan kekhususan kajian pada Kebijakan Pemberdayaan. Minat akademiknya berakar pada keyakinan bahwa kebijakan publik yang sah dan efektif harus tumbuh dari dialog yang setara antara negara dan warga, terutama kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam ruang pengambilan keputusan, seperti perempuan dan masyarakat desa. Fokus penelitiannya tertuju pada dua tema: pertama, kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, mencakup kajian tentang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dari kekerasan, akses perempuan pada layanan publik, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan; kedua, pemberdayaan masyarakat desa, yang menelaah implementasi UU Desa, pengelolaan Dana Desa, kelembagaan BUMDes, dinamika partisipasi warga dalam Musrenbang desa, hingga peran kepala desa sebagai pemimpin transformasional. Hasil-hasil penelitiannya telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional. Komitmen akademiknya tertuju pada penguatan tata kelola pemerintahan yang inklusif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Ia meyakini bahwa partisipasi yang substantif merupakan prasyarat bagi legitimasi kebijakan adaptif yang mampu menjawab kompleksitas tantangan publik kontemporer. Selain mengajar dan meneliti, ia juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan kapasitas pemerintahan desa, pendampingan kelompok perempuan, serta advokasi kebijakan responsif gender di tingkat lokal.

BAB 7
KONSEP DASAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Asrida, S.Pd., M.Pd.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Sektor publik menempati posisi strategis dalam penyelenggaraan negara karena mengelola sumber daya milik masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rahyat. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada laba, sektor publik mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan layanan umum, hingga lembaga non laba dituntut mengelila dana publik secara transparan, akuntabel, dan efisien. Tuntuntan tersebut menjadikan akuntansi sektor publik sebagai instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

Reformasi manajemen keuangan negara yang bergulir sejak awal tahuan 2000-an, ditandai dengan lahirnya paket undang-undang keuangan negara serta penerapan basis akrual penuh sejak tahun 2015, telah mengubah wajah akuntansi sektor publik di Indonesia secara mendasar (Republik Indonesia, 2010). Perubahan ini menuntut penyelenggara negara, akademisi, mahasiswa dan masyarakat luas untuk memahami konsep dasar akuntansi sektor publik sebagai fondasi sebelum mempelajari topik yang lebih teknis, seperti penyusunan laporan keuangan pemerintah maupun audit sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29. https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630

Asrida, & Nurohmah, M. (2025). Akuntabilitas publik era digital di Indonesia: Analisis peluang dan tantangan. *Pena Bangsa: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif*, 1(2), 85–97. https://doi.org/10.69616/pb.v1i2.559

Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (Edisi ketiga). Erlangga.

Gultom, C. M. J., & Harahap, S. N. (2024). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada penyusunan laporan keuangan satuan kerja pemerintah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 300–313. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1846

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 4). Salemba Empat.

Hendriarto, P., Sangapan, L. H., Paryanti, A. B., Manurung, A. H., & Manurung, A. (2025). Akuntansi sektor publik di Indonesia: Kajian sistematis atas transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 3(2), 59–69. https://doi.org/10.38035/jgia.v3i2.467

Hikmah, S., Karina, A., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis penerapan akuntansi berbasis akrual dan penyajian laporan keuangan pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LEMDIKLAT) Polri. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 8681–8689. https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.3622

Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). *Public sector accounting* (6th ed.). Pearson Education.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi*.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2022). *Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual* (Buku SAP 2022). KSAP. https://www.ksap.org

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.

Martadinata, S. (2024). Akuntansi sektor publik di Indonesia: Evaluasi implementasi sistem akrual. *Jurnal Ilmiah Governansi*, 6(3), 620–624.

Nasyfa, S. Q., Lestari, B. P., & Saputra, D. P. (2025). Akuntansi pada organisasi sektor publik. *Jurnal Bisnis Inovatif dan Digital*, 2(3), 103–113. https://doi.org/10.61132/jubid.v2i3.615

Nordiawan, D. (2006). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.

Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, 3(2), 44–58.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

PROFIL PENULIS



Asrida, S.Pd., M.Pd.

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2025. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kewirausahaan dan Etika Bisnis. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional.

Email: asrida@unm.ac.id

BAB 8
AKUNTABILITAS DAN PELAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Asrida, S.Pd., M.Pd.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Keuangan sektor publik menempati posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi instrumen utama negara untuk mendistribusikan sumber daya, menyediakan pelayanan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada laba, keuangan sektor publik dikelola atas nama rakyat dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat, sehingga setiap rupiah yang dikumpulkan melalui pajak, retribusi, maupun sumber penerimaan lain harus dapat dijelaskan penggunaannya secara jujur dan terbuka. Prinsip inilah yang mendasari lahirnya paradigma akuntabilitas publik sebagai fondasi utama reformasi manajemen keuangan negara di Indonesia sejak diterbitkannya paket undang-undang keuangan negara pada awal 2000-an.

Transisi dari model administrasi publik tradisional menuju pendekatan *New Public Management* membawa konsekuensi logis berupa tuntutan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil (Mardiasmo, 2018). Pemerintah, baik di tingkat

DAFTAR PUSTAKA

Adinata, W., Puspandoyo, T., & Ling, M. (2023). Pengaruh opini audit laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 8*(3), 219-234.

ANTARA News. (2026, 3 Agustus). *BPK: SPKN 2026 jadi transformasi standar pemeriksaan sektor publik RI.* https://www.antaranews.com/berita/5689832/bpk-spkn-2026-jadi-transformasi-standar-pemeriksaan-sektor-publik-ri

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2025). *Survei penetrasi pengguna internet Indonesia 2025.* https://www.apjii.or.id/

Asrida, A., & Nurohmah, M. (2025). Akuntabilitas publik era digital di Indonesia: Analisis peluang dan tantangan. *PENA BANGSA: Jurnal Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif, 1*(2), 85-97. https://doi.org/10.69616/pb.v1i2.559

Asrida, A., & Nurohmah, M. (2026). Integrasi prinsip ekonomi hijau dalam perencanaan dan penganggaran sektor publik: Systematic Literature Review (SLR) berbasis PRISMA dalam konteks Indonesia. *ProBisnis: Jurnal Manajemen, 17*(2), 1186-1195.

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. (2023). *Pedoman penandaan anggaran perubahan iklim (Climate Budget Tagging) Edisi 2.* Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2017). *Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.* Jakarta: BPK RI.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2025, 25 November). *BPK sampaikan IHPS I Tahun 2025 ke DPD: Soroti capaian opini pemerintah daerah dan penyelesaian tindak lanjut.* https://www.bpk.go.id/news/bpk-sampaikan-ihps-i-tahun-2025-ke-dpd-soroti-capaian-opini-pemerintah-daerah-dan-penyelesaian-tindak-lanjut

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2025, 28 Mei). *BPK sampaikan LHP atas LKPP Tahun 2024 dan IHPS II Tahun 2024 kepada DPD RI.* https://www.bpk.go.id/news/bpk-sampaikan-lhp-atas-lkpp-tahun-2024-dan-ihps-ii-tahun-2024-kepada-dpd-ri

Bappenas Working Paper. (2025). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Working Papers Kementerian PPN/Bappenas, VIII*(3).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. (2023, 10 Oktober). *Implementasi UU HKPD perkuat pengelolaan keuangan daerah.* https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=42811

Ellwood, S. (1993). *Public sector accountability: The challenge for the public services.* London: Chapman & Hall.

Familia Irene, B., Iriyadi, I., Hasibuan, D., & Pangaribuan, W. S. (2024). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah dengan good governance sebagai variabel intervening. *JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing, 5*(1), 179-195.

Firmansyah. (2025). Peran APIP dalam memperkuat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia, 7*(2).

Gaol, L. L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan tata kelola keuangan publik melalui partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang, 4*(1), 126-140.

Jaya, I., & Yamin, A. (2025). Pengaruh penerapan e-government, akuntabilitas, dan transparansi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP), 8*(5), 5075-5080.

Jurnal Akuntansi AKTIVA. (2024). Transformasi akuntansi digital dan transparansi pelayanan publik sektor pemerintah. *Jurnal Akuntansi AKTIVA, 5*(2).

Kaila Utomo, N., & Nawangsari, A. T. (2025). Transparansi dan akuntabilitas sektor publik: Pilar utama dalam good governance. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, *8*(2), 103-109.

Kompas.com. (2025, 5 Mei). *Kemenkeu gelontorkan Rp76,3 triliun per tahun untuk perubahan iklim.* https://lestari.kompas.com/read/2025/05/05/070623686/kemenkeu-gelontorkan-rp-763-triliun-per-tahun-untuk-perubahan-iklim

Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi 3). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi 4). Yogyakarta: Andi Offset.

Masitha, Z., & Mulyadi, D. Z. (2024). Transparansi keuangan daerah: Studi kualitatif tentang pengelolaan anggaran di Sulawesi Tenggara. *International Journal of Management and Accounting (IJMA), 5*(2), 226.

Media Keuangan Kementerian Keuangan RI. (2025). *Indonesia berkomitmen penuh tangani perubahan iklim.* https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/indonesia-berkomitmen-penuh-tangani-perubahan-iklim

Napan, S. A., Lambe, K. H. P., & Patiung, N. (2025). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui peran APIP: Studi di Inspektorat Kabupaten Nabire. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC), 1*(2), 205-211.

Nurhikmah, A. H., & Sisdianto, E. (2024). Peran akuntan dalam membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan: Perspektif etika. *Jurnal Media Akademik (JMA), 2*.

Nurohmah, M., & Asrida, A. (2026). Investasi publik dalam infrastruktur digital: Tinjauan literatur transformasi tata kelola pemerintahan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review, 6*(1).

Pratiwi, R. I., Haliah, & Kusumawati, A. (2024). The influence of transparency, governance, and financial accountability in managing financial reporting in the public sector. *International Journal of Education and Life Sciences (IJELS), 2*(10), 1165-1179.

Putri, R. D., & Hendaris, R. B. (2025). Public sector accountability and performance: The influence of institutional scale, legislative oversight, and supreme audit judgements. *E-Jurnal Akuntansi, 35*(6), 1752-1771.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2026). *Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.* Jakarta: BPK RI.

Researchhub. (2025). Persepsi masyarakat terhadap transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Kota Medan. *OPTIMAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 5*(1).

Sormin, K. S. B. (2024). Analisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan publik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6*(5), 3962-3973.

PROFIL PENULIS



Asrida, S.Pd., M.Pd.

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar sejak tahun 2025. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kewirausahaan dan Etika Bisnis. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional.

Email: asrida@unm.ac.id

BAB 9
DATA, STATISTIK, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Mahrani, S.Stat., M.Stat.
Universitas Negeri Makassar

Delapan bab terdahulu telah mengantarkan pembaca menelusuri berbagai dimensi Administrasi Publik, mulai dari konsep dan proses kebijakan publik, manajemen dan transformasi digital pelayanan publik, strategi dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, hingga akuntansi dan akuntabilitas keuangan sektor publik. Di balik seluruh rangkaian proses tersebut terdapat satu unsur yang senantiasa hadir meskipun kehadirannya kerap tidak disadari secara eksplisit, yaitu data. Setiap keputusan mengenai kebijakan mana yang perlu diprioritaskan, layanan mana yang perlu diperbaiki, program pemberdayaan mana yang berhasil, atau pos anggaran mana yang perlu dievaluasi kembali, pada dasarnya berpijak pada data yang telah diolah menjadi informasi yang bermakna bagi pengambil Keputusan (Berman & Wang, 2016)

Gagasan bahwa penyelenggaraan negara modern semestinya bertumpu pada bukti empiris bukanlah wacana baru dalam ilmu Administrasi Publik. Chalili (2025) menegaskan bahwa paradigma pelayanan publik kontemporer menuntut birokrasi untuk lebih responsif dan akuntabel kepada warga negara, dan tuntutan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Berman, E. M., & Wang, X. (2016). Essential statistics for public managers and policy analysts (4th ed.). CQ Press.

Berner, M. M. (2010). Statistics for public administration: Practical uses for better decision making (2nd ed.). ICMA Press.

Bruce, D. S. (1997). Statistics and public policy (B. D. Spencer, Ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198523413.001.0001

Chalil, T. M. (2025). Metode kuantitatif untuk analisis kebijakan publik. ITB Press.

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.

Fabio, B., & Paolo, P. (2026). Data-driven learning in the EU: From administrative sources to public value (F. Bertoni & P. Paruolo, Eds.). Springer.

Kuncoro, M. (2018). Metode kuantitatif: Teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi (5th ed.). UPP STIM YKPN.

Macfie, B. P., & Nufrio, P. M. (2005). Applied statistics for public policy. Routledge.

OECD. (2020a). Building capacity for evidence-informed policy-making: Lessons from country experiences. OECD Publishing.

OECD. (2020b). Mobilising evidence for good governance: Taking stock of principles and standards for policy design, implementation and evaluation. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/3f6f736b-en

Scheller, D. S. (2026). Elementary statistics for public administration. Cambridge University Press.

Stone, D. A. (2012). Policy paradox: The art of political decision making (3rd ed.). W. W. Norton & Company.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.

Sugiyono. (2019). Statistika untuk penelitian. Alfabeta.

Walpole, E. R., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). Probability & StatisticsFor Engineers & Scientist (Deirdre Lynch, Ed.; Ninth Edition).

Winarno, B. (2014). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. CAPS.

PROFIL PENULIS



Mahrani, S.Stat., M.Stat adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Negeri Makassar yang memiliki latar belakang pendidikan dan keilmuan di bidang Statistika hingga jenjang Magister (S2) yang diselesaikan pada tahun 2024. Meskipun berlatar belakang statistika, aktivitas akademik berkembang dalam konteks administrasi negara, khususnya pada pemanfaatan metode statistika dan analisis data untuk memahami berbagai persoalan pemerintahan, kebijakan publik, dan pembangunan daerah. Minat akademik yang berakar pada keyakinan bahwa data dan metode statistika memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis bukti (evidence-based governance). Statistika tidak hanya dipandang sebagai seperangkat teknik pengolahan data, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam memahami masalah publik, mengevaluasi kebijakan, mengukur capaian pembangunan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terukur. Fokus akademik dan penelitiannya mencakup penerapan metode statistika dalam bidang administrasi publik, pembangunan manusia, kemiskinan, pengelolaan keuangan publik, evaluasi program dan kebijakan, serta analisis sosial-ekonomi wilayah. Beberapa pendekatan yang menjadi perhatian meliputi analisis regresi data panel, analisis multivariat, Principal Component Analysis (PCA), K-Means Clustering, analisis spasial, analisis deret waktu, serta berbagai metode statistika deskriptif dan inferensial. Dalam kajian pembangunan manusia, salah satu fokus penelitiannya adalah menganalisis keterkaitan belanja

pemerintah, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan faktor sosial-ekonomi terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Indonesia Timur. Dalam bidang pendidikan, saya mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan Statistika serta Metode Penelitian untuk Administrasi Negara, Administrasi Perbandingan Publik, Reformasi Administrasi Publik, Pengembangan Organisasi Publik, serta Teknologi Informasi dan Komputer dalam Administrasi Negara. Komitmennya dalam pengembangan pembelajaran diwujudkan melalui pengembangan MODIS-STAT (Modul Digital Statistika Berbasis SPSS), yang dirancang untuk membantu mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara meningkatkan kemampuan dalam memahami, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara aplikatif. Komitmen akademik diarahkan pada penguatan kapasitas mahasiswa dan akademisi administrasi publik dalam memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Serta memandang bahwa kemampuan statistik menjadi semakin penting dalam menghadapi kompleksitas persoalan pemerintahan dan kebijakan publik, karena setiap kebijakan membutuhkan informasi yang valid, analisis yang tepat, serta evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui integrasi antara keilmuan statistika dan administrasi negara serta berupaya mendorong penggunaan pendekatan kuantitatif yang kontekstual dalam memahami berbagai persoalan sektor publik dan pembangunan.

BAB 10
ANALISIS DATA UNTUK EVALUASI KEBIJAKAN, PELAYANAN, DAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Mahrani, S.Stat., M.Stat.
Universitas Negeri Makassar

Jika Bab 9 mengantarkan mahasiswa pada pertanyaan, "Bagaimana memahami dan membaca data publik?", maka Bab 10 membawa mahasiswa pada tahapan yang lebih lanjut, yaitu "Bagaimana data tersebut digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan dalam Administrasi Publik?" Pergeseran dari kemampuan memahami dan mendeskripsikan data menuju kemampuan menganalisis data merupakan bagian penting dalam membangun kompetensi pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making) di sektor publik (Dunn, 2018)

Dalam konteks Administrasi Publik, data tidak hanya berfungsi untuk menggambarkan suatu kondisi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi perbedaan, mengkaji hubungan antarvariabel, menguji dugaan atau hipotesis, serta memperoleh dasar analitis dalam memahami berbagai fenomena publik. Kemampuan membandingkan kondisi antarwilayah atau antarkelompok, mengidentifikasi pola dan hubungan antarvariabel, serta menafsirkan hasil analisis secara tepat menjadi keterampilan penting bagi mahasiswa dalam memahami

DAFTAR PUSTAKA

Babbie, E. R. (2016). *The practice of social research* (14th ed.). Cengage Learning.

Bruce, D. S. (1997). *Statistics and public policy* (B. D. Spencer, Ed.). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198523413.001.0001

Cochran, W. G. (1977). *Sampling techniques* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Dunn, W. N. (2012). *Public policy analysis: An introduction* (5th ed.). Pearson.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

Fabio, B., & Paolo, P. (2026). *Data-driven learning in the EU: From administrative sources to public value* (F. Bertoni & P. Paruolo, Eds.). Springer.

Kuncoro, M. (2018). *Metode kuantitatif: Teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi* (5th ed.). UPP STIM YKPN.

Macfie, B. P., & Nufrio, P. M. (2005). *Applied statistics for public policy*. Routledge.

OECD, Union, E., & European Commission, J. R. C. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264043466-en

Riduwan. (2010). *Dasar-dasar statistika*. Alfabeta.

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed.). SAGE Publications.

Sugiyono. (2017). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2017). *Probability and statistics for engineers and scientists* (9th ed.). Pearson.

Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*, *12*(4), 5–33.

PROFIL PENULIS



Mahrani, S.Stat., M.Stat adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Negeri Makassar yang memiliki latar belakang pendidikan dan keilmuan di bidang Statistika hingga jenjang Magister (S2) yang diselesaikan pada tahun 2024. Meskipun berlatar belakang statistika, aktivitas akademik berkembang dalam konteks administrasi negara, khususnya pada pemanfaatan metode statistika dan analisis data untuk memahami berbagai persoalan pemerintahan, kebijakan publik, dan pembangunan daerah. Minat akademik yang berakar pada keyakinan bahwa data dan metode statistika memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis bukti (evidence-based governance). Statistika tidak hanya dipandang sebagai seperangkat teknik pengolahan data, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam memahami masalah publik, mengevaluasi kebijakan, mengukur capaian pembangunan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terukur. Fokus akademik dan penelitiannya mencakup penerapan metode statistika dalam bidang administrasi publik, pembangunan manusia, kemiskinan, pengelolaan keuangan publik, evaluasi program dan kebijakan, serta analisis sosial-ekonomi wilayah. Beberapa pendekatan yang menjadi perhatian meliputi analisis regresi data panel, analisis multivariat, Principal Component Analysis (PCA), K-Means Clustering, analisis spasial, analisis deret waktu, serta berbagai metode statistika deskriptif dan inferensial. Dalam kajian pembangunan manusia, salah satu fokus penelitiannya adalah menganalisis keterkaitan belanja

pemerintah, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan faktor sosial-ekonomi terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Indonesia Timur. Dalam bidang pendidikan, saya mengampu mata kuliah yang berkaitan dengan Statistika serta Metode Penelitian untuk Administrasi Negara, Administrasi Perbandingan Publik, Reformasi Administrasi Publik, Pengembangan Organisasi Publik, serta Teknologi Informasi dan Komputer dalam Administrasi Negara. Komitmennya dalam pengembangan pembelajaran diwujudkan melalui pengembangan MODIS-STAT (Modul Digital Statistika Berbasis SPSS), yang dirancang untuk membantu mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara meningkatkan kemampuan dalam memahami, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara aplikatif. Komitmen akademik diarahkan pada penguatan kapasitas mahasiswa dan akademisi administrasi publik dalam memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Serta memandang bahwa kemampuan statistik menjadi semakin penting dalam menghadapi kompleksitas persoalan pemerintahan dan kebijakan publik, karena setiap kebijakan membutuhkan informasi yang valid, analisis yang tepat, serta evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui integrasi antara keilmuan statistika dan administrasi negara serta berupaya mendorong penggunaan pendekatan kuantitatif yang kontekstual dalam memahami berbagai persoalan sektor publik dan pembangunan.

Administrasi publik terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika masyarakat, perkembangan teknologi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatnya kebutuhan akan pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks tersebut, administrasi publik tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas birokrasi, melainkan sebagai proses multidimensional yang mempertemukan kebijakan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya publik, dan pemanfaatan data dalam menghasilkan nilai publik.

Buku *Administrasi Publik Kontemporer: Kebijakan, Pelayanan, Pemberdayaan, Akuntansi, dan Analisis Data Sektor Publik* hadir untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai dimensi tersebut. Buku ini menguraikan keterkaitan antara konsep dan praktik administrasi publik, mulai dari bagaimana pemerintah merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan yang berkualitas, memberdayakan masyarakat, mengelola keuangan publik secara akuntabel, hingga menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pembahasan diawali dengan konsep dasar dan perkembangan kebijakan publik, kemudian dilanjutkan dengan proses, analisis, implementasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan. Perspektif kebijakan selanjutnya dihubungkan dengan manajemen pelayanan publik, termasuk prinsip dan standar pelayanan, kualitas, serta etika pelayanan. Buku ini juga membahas inovasi dan transformasi digital dalam pelayanan publik, digital governance, e-government, serta pentingnya pengukuran kepuasan masyarakat sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan.

Dimensi pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting berikutnya. Pembaca diajak memahami konsep, prinsip, pendekatan, partisipasi masyarakat, serta peran pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pemberdayaan. Pembahasan kemudian bergerak dari aspek konseptual menuju implementasi dan evaluasi program, termasuk perencanaan, pendampingan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, dan pengukuran keberhasilan program pemberdayaan.

Pada aspek pengelolaan sumber daya publik, buku ini membahas konsep dasar akuntansi sektor publik, karakteristik organisasi publik, Standar Akuntansi Pemerintahan, siklus akuntansi, serta teknik dan basis akuntansi. Pembahasan dilanjutkan dengan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sektor publik, transparansi, audit, transformasi digital dalam akuntabilitas, hingga integrasi prinsip ekonomi hijau melalui *green budgeting*. Dengan demikian, pengelolaan keuangan publik ditempatkan bukan hanya sebagai persoalan teknis akuntansi, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Bagian akhir buku menempatkan data sebagai fondasi penting dalam administrasi publik modern. Pembaca diperkenalkan pada data, statistik, sumber dan jenis data, variabel dan pengukuran, penyajian data, statistik deskriptif, hingga literasi data. Pembahasan kemudian berkembang pada analisis perbandingan, hubungan antarvariabel, regresi, evaluasi kebijakan, pelayanan, pemberdayaan, serta kinerja sektor publik. Buku ini menekankan bahwa data tidak berhenti sebagai angka, tetapi harus diterjemahkan menjadi informasi, temuan, dan implikasi kebijakan yang dapat mendukung keputusan publik secara bertanggung jawab. Dengan cakupan tersebut, buku ini menawarkan perspektif yang integratif mengenai administrasi publik kontemporer. Kebijakan membutuhkan pelayanan yang berkualitas; pelayanan membutuhkan inovasi dan transformasi digital; pemberdayaan membutuhkan partisipasi dan kelembagaan yang kuat; pengelolaan keuangan membutuhkan akuntabilitas dan transparansi; sementara seluruh proses tersebut membutuhkan data yang mampu mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Keterhubungan inilah yang menjadi kekuatan utama buku dalam melihat administrasi publik sebagai sebuah ekosistem tata kelola yang saling berkaitan.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi pemerintahan, aparatur sipil negara, pengelola organisasi publik, maupun pembaca yang memiliki perhatian terhadap perkembangan pemerintahan dan pelayanan publik. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memahami administrasi publik secara lebih utuh sekaligus mendorong praktik pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, inovatif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

CV. Tahta Media Group
Sukoharjo, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.co.id
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896 5427 3996

ISBN 978-634-242-353-4 (PDF)